

Bagian I

UMUM



Foto: Kahar

1

Buruh Menggugat

Kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena dengan pertumbuhan ekonomi itulah, kita memiliki banyak harapan: angka kemiskinan bisa ditekan dan kemudian lapangan pekerjaan bisa diciptakan.

Yang ingin kita kritisi adalah, kebijakan pemerintah yang mengukur pertumbuhan ekonomi hanya semata-mata melalui pendekatan dari sisi pengeluaran. Menurut saya, cara mengukur pertumbuhan ekonomi yang demikian salah kaprah.

Saya melihat dari sisi buruh.

Jika pendekatannya dari sisi pengeluaran, maka akan sulit terbaca, apakah pertumbuhan ekonomi itu memberikan dampak pada menguatnya daya beli rakyat atau tidak? Apakah penghasilan rakyat tumbuh? Apakah suku bunganya bertambah? Kita tidak akan pernah bisa melihat hal itu.

Sederhananya begini. Mengapa ketika pemerintah mengatakan ekonomi sedang tumbuh, tetapi rakyat miskin masih banyak? Karena, memang, ada sesuatu yang salah. Meminjam pemikiran Burhanudin Abdullah, situasi ini disebut sebagai paradoks dalam pertumbuhan ekonomi. Karena meskipun ekonomi tumbuh, namun belum mampu menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang semacam ini adalah pertumbuhan yang tidak berkualitas.

Lebih jauh, kita perlu mengantisipasi terjadinya "*paradox economic growth*" yang dapat membuat kesenjangan semakin melebar. Di mana dalam konteks "menetes ke bawah" pertumbuhan ekonomi sekian persen, seharusnya akan menciptakan lapangan kerja sekian ratus ribu bagi tenaga kerja baru. Tetapi yang saat ini terjadi justru sebaliknya. Hanya orang kaya yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu.

Kita semua bisa merasakan ini: ekonomi tumbuh, akan tetapi masih banyak orang yang miskin. PHK masih saja terus terjadi. Kemudian secara faktual jumlah pengangguran meningkat. Lapangan pekerjaan tetap saja sulit didapat.

Dan semakin tidak bisa kita pahami, meskipun katanya saat ini pertumbuhan ekonomi trennya menurun, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di 5 (lima) besar pertumbuhan ekonomi dunia. Tahun

lalu pertumbuhan kita 6,3% dan pada 2 tahun lalu masih menempati peringkat 2 besar dunia, setelah China. Data ini dirilis oleh Bank Dunia, jadi saya tidak mengada-ada.

Tahun lalu, Produk Domestik Bruto (PDB) kita nomor 15 dunia. Sementara pada tahun 2025 nanti, kalau ekonomi tumbuh terus, maka PDB Indonesia diperkirakan tembus ke peringkat 10 besar dunia. Tahun 2030, Indonesia diprediksi akan masuk ke nomor 7 dunia. Setara dengan Amerika, Kanada, Prancis, dan sebagainya.

Jika mau kita gambarkan secara sederhana, PDB itu adalah pendapatannya negara. Idealnya, semakin tinggi pendapatan suatu negara, maka kesejahteraan rakyatnya juga harus semakin tinggi. Tetapi fakta-fakta yang ada tidak menunjukkan hal itu. Di Indonesia, masuknya investasi tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. PDB yang besar tidak dirasakan oleh sebagian besar rakyat.

Kita setuju investasi masuk. Kita setuju pengusaha harus mendapatkan keuntungan. Bahkan kita harus sama-sama berjuang agar ekonomi terus tumbuh. Tetapi yang kita tidak setuju adalah, ketika ekonomi tumbuh, hanya segelintir orang yang menikmati pertumbuhannya.

Secara sederhana, saya sering mengatakan. Kamu boleh kaya. Kamu boleh beli mobil mewah. Tinggal di rumah yang megah. Tapi secara bersamaan, kamu tidak boleh memiskinkan kami, kaum buruh.

Alat paling mudah untuk mengukur miskin atau tidak miskin adalah pendapatan. Ketika berbicara pendapatan, itu artinya kita sedang berbicara tentang upah. Selain itu, kita tidak ingin ketika upah naik kemudian diiringi dengan tingkat harga yang juga ikut naik. Di sinilah peran negara. Jadi, pemerintah juga harus turun tangan untuk mengendalikan harga.

Kritik Kita

Setelah memahami dinamika pertumbuhan ekonomi, selanjutnya saya ingin menyampaikan kritik terkait dengan adanya paradoks pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pemerintah hari ini – mungkin juga pemerintah yang akan datang – masih menggunakan pendekatan dari sisi pengeluaran. Apa itu sisi pengeluaran? Sisi pengeluaran meliputi konsumsi, investasi, belanja negara (APBN/APBD), dan *net export*. Data yang ada menunjukkan, saat ini kita lebih banyak impor. Wajar kalau kemudian defisit.

Celakanya, pertumbuhan ekonomi yang dikejar hanya fokus untuk mengundang investasi. Maka konsekuensinya para investor tersebut akan meminta adanya “karpet merah” yang disediakan pemerintah.

Coba Anda lihat. Investasi masuk ke Indonesia dengan beragam kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam bahasa saya, ada “karpet merah” yang digelar untuk mereka yang datang. Karpet merah yang saya maksud adalah, buruh *outsourcing* (*flexible labour market*), menggunakan jam kerja panjang (*flexible working hour*), meminta kebijakan upah murah (*low wages policy*), dan menekankan kontrak kerja individu tanpa hak berserikat (*individual contract*).

Itulah sebabnya, saya mengkritik kebijakan pemerintah yang menjadikan buruh sebagai komoditas dalam industri. Saya mengkritik pemerintah yang menjual buruh dengan upah murah, jam kerja yang panjang dan ditambah lagi dengan kontrak individu yang semakin melemahkan posisi tawar buruh itu sendiri.

Hal-hal seperti inilah yang kita permasalahkan.

Mengapa baru mengundang saja – mereka belum datang dan belum tentu mau datang – diskusinya sudah tentang upah buruh yang murah dan *flexibel labour market*?

Pasar Kerja yang Fleksibel

Mari berbicara tentang *outsourcing*.

Sering saya ditanya oleh pengusaha. Baik di dalam maupun di luar negeri. Mengapa Anda menolak *labour market flexibility*? Mereka memberi contoh, banyak negara juga menerapkan pasar kerja yang fleksibel.

“Lalu apa masalahnya dengan Indonesia?” tanya mereka.

Saya jawab. Masalahnya adalah, penerapan *outsourcing* di Indonesia hanya berhenti pada pasar kerja yang fleksibel. Mereka tak pernah menyinggung, di negara lain seperti Amerika, Eropa, dan Jepang, meskipun *labour market flexibility* diterapkan, akan tetapi ada dua syarat yang mereka penuhi: upah layak dan jaminan sosial.

Saya rasa, kalau upah kita layak dan dijamin oleh negara sepanjang republik ini masih berdiri, maka status hubungan kerja cenderung “tidak dipersoalkan”. Tentu yang saya maksud upah layak bukan layaknya buruh Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam KHL. Batasan layak yang saya maksud adalah, buruh benar-benar bisa menabung dari upah yang mereka terima.

Yang kedua, ada jaminan sosial. Di beberapa negara dikenal yang namanya jaminan pengangguran. Ketika *labour market flexibility* diterapkan, jaminan sosial sudah berjalan. Dalam bayangan saya, kalau orang menganggur saja dibayar, maka status hubungan kerja menjadi kurang diperdebatkan. Bukannya hubungan kerja tidak penting. Tetapi masyarakat tidak lagi khawatir kehilangan pekerjaan,

karena mereka tahu negara akan turun tangan jika mereka kehilangan pekerjaan.

Sayangnya, di Indonesia dan negara-negara berkembang, *outsourcing* dilaksanakan tanpa memenuhi dua syarat itu. Di Indonesia, *labour market flexibility* digunakan justru untuk menghindari upah layak dan jaminan sosial. Dengan kata lain, *outsourcing*, pada saat yang bersamaan juga berarti penerapan atas upah murah, bekerja tanpa kepastian, dan tidak mendapatkan jaminan sosial.

Jam Kerja yang Panjang

Saat ini, buruh-buruh di Jerman sedang berjuang untuk mengurangi jam kerja dari 35 jam per minggu menjadi 30 jam. Sudah begitu, mereka meminta agar upahnya dinaikkan lebih besar lagi.

Saya rasa, perjuangan mereka sangat tepat. Hebat. Sudah meminta agar jam kerja dikurangi, mereka juga menuntut agar upah dinaikkan.

Kalau di Indonesia, rasanya hal itu tidak berlaku. Di negeri ini, buruh bahkan terbiasa bekerja hingga 12 jam dengan lembur. Ironisnya, meskipun sudah bekerja sepanjang waktu, mereka masih saja miskin. Lebih parah lagi, ada anggapan, ketika pengusaha sudah memberikan lembur, itu pertanda pengusaha sedang berbaik hati kepada buruh-buruhnya.

“Ini saya kasih tambah lemburan.” Begini kira-kira pengusaha berkata kepada buruh saat memberikan lemburan. Ada uang lebih yang didapat buruh pada saat gajian. Buruh tidak sadar, nilai lembur yang mereka terima tidak sebanding dengan kerja yang dikeluarkannya.

Ini yang kita persoalkan. Jadi, bukan investasinya yang kita gugat. Bukan pengusahanya yang kita gugat. Kita tidak anti-investasi. Kita juga tidak bermusuhan dengan pengusaha. Tetapi kalau kemudian investasi masuk dan buruh tetap menjadi miskin, itu yang kita persoalkan.

Tegasnya. Kita menolak sistem yang saat ini digunakan: upah murah, jam kerja yang panjang.

Pada tahun 1.800-an, ratusan ribu buruh mati di Chicago, yang kemudian diperingati sebagai May Day. Mereka memperjuangkan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam bersosialisasi. Sekian ratus tahun berlalu, tetapi jam kerja yang panjang itu masih saja berlaku. Ini yang kita tidak mau.

Ironisnya, banyak buruh yang bersenang hati. Mereka masih belum sadar, jika sesungguhnya sedang menanam penyakitnya sendiri. Nanti kalau sudah tua, sakit-sakitan, dan begitu sakit – karena upahnya rendah dan pergi ke dokter tidak mampu – yang tadinya bisa *nyicil* motor waktu kerja, pas sudah selesai kerja motor yang dicicilnya itu dijual kembali untuk berobat.

Kemiskinan kembali menciptakan kemiskinan.

Saya tahu, buruh bersedia bekerja dalam waktu yang panjang karena upahnya kurang. Mereka mencari tambahan dengan lembur. Banyak juga yang bekerja melampaui waktu normal tanpa mendapatkan upah lembur, hanya karena takut pada ancaman pemecatan. Apa pun itu, cara-cara seperti ini harus dihentikan.

Jika kehidupan kita terus-menerus seperti itu, apa bedanya dengan binatang? Begitu pagi pertebaran mencari makan, lantas ketika malam menjelang kembali pulang ke kandang dengan penghasilan yang sekadar pas-pasan. Hidup hanya sekadar mencari makan.

Apakah kita mau terus-menerus seperti itu? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya, tegas saya akan menjawab, tidak!

Ini tentang rasa keadilan.

Bukan karena buruh-buruh itu mendapatkan pekerjaan lantas mereka harus menunduk. Sering saya mengatakan, kalau ada orang miskin karena tidak bekerja, kita bisa terima. Karena dia tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Maka negara harus membantu dalam bentuk raskin, jaminan kesehatan ketika sakit, pendidikan berkualitas yang ditanggung negara, transportasi publik yang murah, dan sebagainya. Bukan seperti yang terjadi sekarang. Meskipun buruh sudah bekerja selama 30 hingga 40 tahun, akan tetapi mereka masih tetap miskin.

Apa yang saya sampaikan ini bukan retorika. Ini adalah fakta. Saya sendiri masih bekerja. Sehingga saya tahu betul seperti apa kemiskinan yang dialami oleh kaum buruh.

Kalaupun buruh bisa membeli motor, pasti itu dibeli dengan sistem kredit. Ada yang mengatakan, “Bung Iqbal, buruh sudah punya motor *Ninja*. Megapa masih saja dibilang miskin?”

Tahukah Anda, buruh yang bisa memiliki motor *Ninja* itu berapa jam bekerja dalam sehari? Sehari dia bekerja hingga 12 jam untuk lembur. Sementara itu, di rumah, istrinya membantu perekonomian keluarga dengan membuka warung. Bandingkan dengan orang-orang kaya itu yang hanya bekerja beberapa jam, tetapi bisa memiliki segalanya. Sedangkan buruh yang bekerja 12 jam ditambah istrinya di rumah jualan, baru bisa kredit motor *Ninja*, itu pun sudah dipermasalahkan. Ini tidak adil. Sebagai pemimpin buruh saya berpendapat, jangankan membeli